

## KONFLIK ETNIK MADURA DAN MELAYU SAMBAS: TINJAUAN KONFLIK KEKERASAN JOHAN GALTUNG

Atem

### Abstract

*This article aims to discuss Johan Galtung's perspective in analyzing the conflict that occurred between the Madura and Malay ethnic groups in Sambas through the concept of violence. The conflict has been seen as a natural process in community life with the cultural, religious, and ideological elements involved. The conflict in 1999 between Madura and Malay in Sambas regency happened sporadically and formed into violence. The conflict is constructed as negativity and an unwanted event. Theorists see that conflict can be understood as both a positive and a negative thing. Johan Galtung is one of the theorists who see a conflict with multidisciplinary analysis. He introduced the violence concept in three dimensions: structural violence, direct violence, and cultural violence. This article uses the qualitative method with a descriptive approach through textual reality analysis and literature review.*

**Keyword:** Johan Galtung, Conflict, Violence

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pemikiran Johan Galtung dalam menganalisis konflik yang terjadi antaretnik Madura dan Melayu di Sambas melalui konsep kekerasan. Konflik dipandang sebagai proses alamiah dalam kehidupan masyarakat yang sering terjadi dengan melibatkan unsur-unsur kebudayaan, agama dan ideologi. Kerusuhan yang terjadi tahun 1999 antara etnik Madura dan Melayu Kabupaten Sambas terjadi secara sporadis dan telah termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Selama ini konflik dikonstruksi sebagai suatu peristiwa negatif dan tidak diinginkan. Para teoritis melihat konflik dapat dipahami sebagai suatu hal yang positif dan juga negatif. Johan Galtung salah seorang tokoh yang melihat konflik dengan cara analisis multidisipliner, ia memperkenalkan konsep kekerasan kedalam tiga dimensi, yakni kekerasan struktural (*structural violence*), kekerasan langsung (*direct violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis realitas teksual dan sumber data kepustakaan (*literature review*) yang relevan.

**Kata kunci:** Johan Galtung, konflik, Kekerasan

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan orang lain baik antarindividu, kelompok, dan relasi mereka dengan struktur masyarakat serta lembaga secara luas. Hubungan yang terjalin tersebut tidak dapat menepis muatan persatuan, perubahan, perselisihan dan bahkan permusuhan yang muncul dalam sebuah konflik. Perbedaan berbagai latar belakang yang dimiliki masyarakat dalam konteks negara Indonesia tidak mampu

selamanya diharmonisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak jarang muncul pertentangan dalam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, etnis, maupun agama. Perlu dipahami tentang negeri ini adalah adanya fakta *vulnerable society* (masyarakat rentan) Indonesia, ada tiga ciri mendasar yakni: 1) tingginya tingkat segregasi sosial; 2) rendahnya ketermapilan partisipasi politik demokrasi; 3) terisolasinya dalam pulau-pulau kecil (Susan, 2010).

Indonesia seringkali diwarnai konflik antaretnik, konflik terjadi disebabkan berbagai faktor dan beragam bentuk, tidak sedikit konflik yang muncul ke permukaan dalam bentuk benturan fisik dan kekerasan, namun terkadang juga tidak bersifat aktif atau tersembunyi. Di Kalimantan Barat konflik etnik juga seringkali terjadi, pertama kali konflik antar etnik muncul di Kalimantan Barat pada tahun 1962 dan terus berulang hingga tahun 1999 yang melibatkan beberapa etnik di Kalimantan Barat seperti Madura, Melayu, Dayak dan Tiong Hoa (sering disebut entis Cina). Salah-satu konflik antaretnik yang paling mencekam terakhir kali terjadi pada tahun 1999 antara kelompok masyarakat etnik Madura dan etnik Melayu di Kabupaten Sambas. Konflik yang terjadi banyak memakan korban dan menimbulkan traumatik yang mendalam bagi kedua belah pihak.

Potensi-potensi konflik pada dasarnya dapat dilihat dengan menggunakan tinjauan-tinjauan dari teori konflik yang ada, seperti dengan melihat struktur, karakter, budaya, dan demografi masyarakat. Berbagai aspek harus dilihat untuk meninjau konflik baik secara teoritis maupun faktual. Aspek teoritis konflik banyak pandangan sehingga mengkaji konflik dapat dilihat dari berbagai sisi atau mengkaji berdasarkan pandangan, sehingga hasilnya akan lebih luas (Sulaeman, 2010). Kasus konflik antaretnik Madura dan Melayu di Sambas, sebenarnya dapat dilihat melalui strotipe yang telah tertanam pada masing-masing etnik yakni, masyarakat Melayu dikenal dengan karakternya yang pengalah, pemalu, patuh pada adat dan taat beragama sedangkan masyarakat Madura karakternya dikenal kasar, keras, mudah terseinggung, arogan dan mau menang sendiri (Setiadi, 2005). Perbedaan setreotif kedua kelompok tersebut dapat menunjukkan betapa tingginya potensi konflik yang dapat terjadi, karakter masyarakat Madura seperti yang telah dijelaskan sangat bertentangan dengan karakter masyarakat Melayu begitu pula sebaliknya, oleh karenanya tinjauan teoritis diperlukan untuk mengkaji potensi-potensi tersebut. Perbedaan budaya maupun sikap masing-masing kelompok dalam menjalin hubungan pada dasarnya bukanlah suatu masalah mutlak, akan tetapi perbedaan tersebut akan mendapatkan penolakan dari salah satu kelompok ketika adanya perbedaanya yang dianggap merugikan, mengganggu dan bahkan

mengancam keharmonisan salah satu kelompok yang berpotensi menjadi konflik. Potensi dan penyebab konflik merupakan akar untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif terhadap konflik yang terjadi yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan analisis guna mendapatkan jalan keluar untuk meredakan dan menyelesaikan konflik. Terkadang tidak jarang orang-orang yang mengabaikan pentingnya mengidentifikasi dan memahami potensi maupun penyebab konflik yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan rekonsiliasi konflik. Berikut akan digambarkan pemahaman konflik perspektif Johan Galtung dalam konteks konflik Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Sebelum lebih jauh memahami pemikiran Johan Galtung terhadap konflik, secara umum konflik dapat diartikan sebagai eksisnya suatu pertentangan yang terjadi baik antarindividu, antarkelompok maupun individu dan kelompok terhadap suatu nilai-nilai tertentu. konflik itu sendiri merupakan bagian alamiah dari keberadaan dan ditakdirkan menjadi sebuah realitas bagi manusia yang bekerja bersama (Ungerleider, 2008). Senada dengan itu (Avruch, 1998) juga memandang bahwa konflik merupakan ciri dari semua manusia sebagai masyarakat dan berpotensi menjadi aspek pada semua hubungan sosial. Sebagaimana Coser (dalam Ulum, 2013) melihat bahwa dalam prosesnya konflik bersifat instrumental baik dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Kemudian konflik ini menurut Seymour-Smith (1986; dalam Thakore, 2013) dipandang oleh Marxian bahwa memang dibangun kedalam suatu sistem sosial sebagai stimulus utama untuk perubahan sosial. Berarti pada dasarnya dalam sebuah hubungan sosial kaitannya dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menghindari konflik, karena ia akan tetap muncul sebagai bagian proses yang alamiah dan tetap eksis dimana konflik ini mampu menciptakan perubahan-perubahan pada ruang lingkup yang lebih luas yakni sistem sosial.

Pandangan yang sedikit berbeda diutarakan oleh Wallensteen (2002) yang menyoroiti konflik dari aspek penguasaan sumber daya, dimana ia memandang konflik ialah situasi yang dimana terdapat lebih dari satu kelompok yang menginginkan sumber yang langka pada waktu yang sama. Selaras dengan itu, Appelbaum, dkk (1999) menilai konflik juga sebagai proses interaksi sosial yang mengacu pada perebutan klaim atas sumber daya, kekuasaan dan status, kepercayaan dan preferensi serta keinginan lainnya. Dengan begitu melihat pada sumber konflik itu sendiri hampir tidak terbatas sebagaimana konflik itu merupakan

fenomena alam dalam hubungan sosial seperti yang disinggung sebelumnya. Hanya saja konflik hampir selalu dikaitkan pada destruktif antagonisme yang dimanifestasikan kedalam bentuk hubungan yang tidak nyaman, kekerasan ataupun perang. Kemudian gagasan konflik semacam ini memicu untuk mencoba menghindari konflik pada tahap awal sehingga pada akhirnya membuat situasi yang skalanya semakin meluas.

Terkait dengan situasi tersebut Galtung (2004) dalam bukunya berjudul “*Transcend and Transform an Introduction to Konflik Work,*” menjelaskan bahwa konflik itu sendiri memiliki 4 tingkatan (level) meskipun demikian tingkatan ini sendiri tidak ia maksudkan untuk menggambarkan tinggi atau rendahnya level konflik karena semua konflik itu terlahir dalam keadaan sama dan mempunyai persamaan untuk di olah atau direkayasa ataupun di transformasikan.

Keempat level konflik yang diklasifikasikan Galtung (2004) itu terbagi berikut:

- a. Konflik Mikro, yaitu antarindividu yang mana lebih pada adanya kontradiksi kepentingan dalam diri individu (diri sendiri) ataupun individu lainnya, sehingga terdapat kecenderungan adanya pertentangan batin terhadap apa yang diinginkan atau sulitnya penentuan keputusan yang melibatkan orang lain.
- b. Konflik Meso, pada tahap ini keseimbangan atau kontradiksi antarindividu tidak lagi menjadi fokusnya namun sudah melangkah pada penglibatan orang-orang dalam suatu kelompok yang berkaitan dengan kelompok lainnya.
- c. Konflik Makro: ruang lingkup konflik makro digambarkan Galtung pada kategori yang sudah melibatkan antarbangsa dan negara, termasuk juga antarnegara dengan negara.
- d. Konflik Mega. Pada tingkatan terakhir ini konflik sudah dianggap paling besar cakupannya dikarenakan sudah terjadi dalam konteks hubungan kewilayahan dan negara dengan peradaban dan bangsa sebagai anggotanya.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian deskriptif melalui analisis sumber kepustakaan yang relevan. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistic (Atem dan Niko, 2020).

Pengumpulan data melalui telaah sumber-sumber literatur (*literature review*) dan realitas tekstual sebagai sumber data yakni baik berupa jurnal, buku, ataupun dokumen-dokumen terkait yang dipilih kemudian di reduksi untuk di refleksikan dan dianalisis serta disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Terdiri dari 19 kecamatan dan 193 desa/kelurahan dan terletak diantara 1°23” Lintang Utara dan 108°39” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, Laut Natuna; sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia, Kabupaten Bengkayang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang; dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Berdasarkan hasil Sensus tahun 2020, penduduk Kabupaten Sambas berjumlah sekitar 629.905 jiwa. Suku Mayoritas terdiri dari Melayu, Dayak dan Tiong Hoa (cina) Kelompok masyarakat etnis Madura tidak lagi menjadi bagian dalam demografi di Kabupaten Sambas setelah konflik atau kerusuhan yang terjadi tahun 1999 yang menyebabkan terusirnya etnis Madura dari Kabupaten Sambas.

Dilihat dari sejarah kependudukan di Kabupaten Sambas, bahwa kehadiran masyarakat Madura ke Sambas sudah ada cukup lama, menurut Achadiyat (dalam Arkanudin, 2006) Orang Madura di Kalimantan Barat adalah pendatang dari Bangkalan Madura menjelang akhir abad kesembilan, dan baru mulai tinggal di wilayah ini sekitar tahun 1920, dengan niat untuk mencari lahan yang lebih subur selain di pulau asalnya. Versi lain menyebutkan bahwa migrasi pertama etnis Madura terjadi pada tahun 1902 yang ditandai dengan kedatangan mereka di Ketapang, kemudian berlanjut pada tahun 1910 ketika mereka tiba di Pontianak dan pada tahun 1920-1930 tiba di Sambas. Migrasi selanjutnya terjadi dalam jumlah besar pada tahun 1930 yang secara sengaja didatangkan oleh pemerintah Belanda. Sedangkan berdasarkan *oral history*, bahwa etnis Madura telah datang ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18, yakni seiring dengan kedatangan mereka bersama anggota pasukan kerajaan Mataram (Setiadi, 2005). Seiring waktu pertambahan jumlah penduduk Madura di Kalimantan Barat semakin meningkat terutama di Kabupaten Sambas, terlebih lagi ketika adanya program transmigrasi yang di lakukan oleh pemerintah, jumlah populasi masyarakat Madura yang ada semakin padat.

Kehadiran masyarakat Madura di kabupaten Sambas memberikan pola kehidupan baru bagi masyarakat setempat terutama dalam hal matapencaharian atau tenaga kerja.

Banyak diantara masyarakat Madura yang bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan kasar, seperti, buruh tani, penarik becak, supir, pedagang kecil-kecilan dan menjadi awak kapal penyebrangan. Namun tidak sedikit pula diantara mereka yang tergolong ekonomi tinggi, hal ini umumnya terjadi bagi masyarakat yang telah lama menetap di Sambas, sehingga mereka telah memiliki lahan, modal, dan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik seperti kontraktor, pengelola tambang dan perdagangan, dan sebagian diantaranya juga menjadi petani, peternak sapi dan kambing. Masyarakat Madura dalam bekerja juga dikenal ulet, rajin, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Beberapa penelitian menerangkan bahwa kelompok etnis Madura turut mengembangkan jangkauan penetrasinya jauh lebih luas apabila dibandingkan dengan etnis pendatang lainnya yang ada di Kalimantan Barat seperti, Jawa dan Sunda, yakni tidak hanya dalam bidang pertanian dan ekonomi namun juga dalam bidang sosial-politik seperti menjadi anggota DPRD setempat (Pelly, 1999). Mereka sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan diantara sesama kelompoknya, hubungan antarmasyarakat Madura sangat erat dan terikat, walaupun tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat yang terpenting adalah asal daerahnya sama, yakni dari pulau Madura. Hubungan yang tejalin dalam kelompok masyarakat ini menggambarkan pola kehidupan masyarakat yang eksklusif. Bagi mereka membantu dan menolong orang dari daerah asalnya adalah suatu kewajiban, mereka harus mau menerima pendatang musiman dari madura serta berusaha mencarikan pekerjaan untuk mereka (Achadiyat 1989; Arkanudin 2006).

Kehidupan masyarakat Madura di Sambas yang berdampingan secara langsung dengan masyarakat Melayu, secara tidak langsung telah mempertemukan berbagai perbedaan mendasar baik kebudayaan, karakter, sikap dan perilaku maupun pola hubungan sosial dianatar kedua etnis tersebut. Masyarakat Melayu sebagai masyarakat setempat telah dikenal sebagai kelompok masyarakat yang ramah, pengalah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Istilah Melayu itu sendiri menurut Alqadrie (dalam Bahari, 2008) lebih merupakan media identifikasi dari pada sebagai kelompok etnik dalam artian ikatan primordialistik dan identik beragama Islam. Agama telah menjadi salah satu indikator penting dalam pelabelan kelompok etnis Melayu, seperti ketika masyarakat dari etnis Dayak memeluk agama Islam maka sering diidentikan sebagai etnik Melayu, anggapan ini telah menjadi pemahaman umum bagi etnik Dayak dan Melayu.

Di Kabupaten Sambas masyarakat Melayu dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, menjunjung kuat hubungan sesama entis dan antaretnis serta nilai-nilai gotong royong, tidak suka permusuhan dan dikenal sangat penyabar sehingga juga

sering dianggap penakut. Orang Melayu banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri, di bidang politik maupun instansi pemerintahan, dan yang tinggal di desa bekerja sebagai petani, dan nelayan. Adanya pandangan bahwa pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat dalam kalangan masyarakat Melayu, membuat mereka berlomba-lomba menguasai bidang pemerintahan dan masih minimnya yang menjadi pengusaha (pelaku ekonomi), jika ada jumlahnya masih sedikit dan hanya bergerak di sektor ekonomi mikro (Bahari, 2008). Kehidupan etnis Madura dan Melayu di kabupaten Sambas yang berlangsung sudah begitu lama tidak menjamin terikatnya rasa kekeluargaan maupun kekerabatan, justru sebaliknya perbedaan yang mendasar dari kedua etnis tidak jarang memunculkan perselisihan-perselisihan dalam skala kecil, namun selalu dapat diselesaikan dengan cara-cara musyawarah maupun kesepakatan. Akan tetapi interaksi dalam lintas budaya yang pasti memiliki perbedaan-perbedaan serta dimensi sikap yang memunculkan berbagai persepsi, prasangka dan isu-isu yang kaitannya dengan budaya dari kelompok etnis lain sehingga menjadi pemicu konflik yang sulit dihindarkan, dan ketika konflik muncul kepermukaan eskalasinya dapat menjadi luas dan mengakar.

### **PENYEBAB KONFLIK MADURA DAN MELAYU SAMBAS**

Sepertinya tidak satupun masyarakat yang ada dibelahan dunia yang tidak mengalami konflik. Hanya saja intensitas, dan luas cakupan konflik serta wilayah terjadinya yang menjadi pembeda konflik tersebut. Ralp Dahrendorf meyakini bahwa konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai “*integrated into a common frame of reference*”. Sehingga konflik dapat dikatakan tidak akan terjadi apabila setiap kelompok atau individu sebelumnya tidak terjalin suatu proses interaksi, komunikasi maupun hubungan-hubungan interpersonal, *ingroup* atau *outgroup*, baik dalam intensitas yang tinggi maupun intensitas rendah. Relasi yang terjalin antarkelompok dengan bermacam perbedaan latar belakang baik nilai, budaya dan keyakinan-keyakinan tertentu yang dianut oleh tiap-tiap kelompok dalam keseharian kehidupan mereka tidak serta-merta selalu dapat diterima, perbedaan-perbedaan kecil dapat menjelma menjadi potensi konflik yang jauh lebih besar, dan saat terjadi gesekan dan benturan pada batas-batas yang dimiliki kedua kelompok maka konflik akan muncul. Tidak salah jika konflik juga dipandang sebagai proses sosiasi yang mana dapat membangun asosiasi antara individu maupun kelompok akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi disosiasi, yakni adanya intraksi permusuhan dan perselisihan antar masyarakat, yang mana menurut pernyataan Simmel (dalam Susan,

2010) bahwa: “*The actually dissociating elements are the causes of the conflict-hatred and envy, want and desire*”, kecemburuan, kebencian, keinginan dan nafsu adalah akar penyebab dari disosiasi.

Sejarah telah mencatat bahwa konflik seringkali diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian, sama halnya dengan konflik yang terjadi di Kabupaten Sambas telah termanifestasikan dalam bentuk kekerasan fisik, yang mana benturan tersebut menimbulkan banyak korban. Konflik etnis yang melibatkan kelompok masyarakat Madura bukanlah pertama kali terjadi di Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah banyak tercatat dalam beberapa literatur, hasil penelitian maupun publikasi media, sebelum pecahnya konflik di Kabupaten Sambas telah terlebih dahulu terjadi konflik antara Masyarakat etnis Dayak dengan Madura namun konflik tersebut mereda walaupun tidak hilang sepenuhnya, dan kembali mencuat kepermukaan saat konflik yang terjadi di Sambas. Yang terlibat konflik pada tahun 1999 tersebut hanya masyarakat Melayu yang ada di Sambas, dan tidak ada keterlibatan etnis Melayu di luar Kabupaten Sambas, namun perlu diketahui bahwa pada konflik yang terjadi secara sporadis tersebut juga turut melibatkan etnis Dayak akan tetapi dalam skala kelompok yang jumlahnya sedikit. Tidak banyak yang mengetahui bahwa masyarakat Dayak turut terlibat saat konflik di Sambas, karena etnis Dayak yang terlibat jumlahnya sedikit maka orang-orang lebih mengenal konflik yang terjadi hanya diantara dua etnis, meskipun kenyataannya dapat dikatakan bahwa konflik di Sambas merupakan konflik yang melibatkan tiga kelompok etnis, karena keterlibatan etnis Dayak bukanlah sebagai kelompok ‘penengah’ namun juga berperan sebagai pihak yang turut menentang kelompok etnis Madura, maka dalam konflik tersebut etnis Melayu dan Dayak memiliki kepentingan yang sama.

Akar penyebab konflik yang terjadi di Sambas masih mengundang pertanyaan dan belum mendapatkan jawaban yang jelas. Walaupun beberapa catatan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik pada tahun 1999 tersebut karena adanya insiden pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu etnis, namun hal tersebut sebenarnya bukanlah akar dari konflik itu sendiri. Apabila ditinjau lebih mendalam maka akan dapat ditemukan bahwa penyebab konflik itu jauh lebih kompleks dan telah muncul jauh sebelum insiden pembunuhan tersebut terjadi. Mengungkapkan sumber konflik memang tidak hanya dapat berpusat pada satu titik saja atau hanya melihat bagaimana kedua belah pihak berkonfrontasi dipermukaan, akan tetapi perlu dilakukan pendekatan terhadap sumber dan penyebab konflik secara lebih komprehensif, yakni mengaitkan berbagai proses sosial baik, nilai, sikap,

kebiasaan maupun pola tindakan, demografi, serta situasi yang mengarah pada sumber-sumber konflik, sehingga nantinya dapat dihasilkan resolusi konflik yang tepat sesuai dengan penyebab atau sumber konflik itu sendiri.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas, Memiliki kesamaan penyebabnya dengan konflik-konflik antar etnis yang sebelumnya terjadi di Kalimantan Barat, seperti konflik Masyarakat Dayak dan Madura, kesamaan penyebab terjadinya konflik tersebut adalah adanya perbedaan sosial budaya. Pertemuan beberapa etnik yang berbeda latar belakang kehidupan sosial budaya pada suatu tempat pemukiman sangat potensial menimbulkan konflik. Menurut Watson, (dalam Arkanudin, 2006) konflik hampir selalu terjadi dalam pertemuan sosial yang melibatkan orang lebih dari satu etnik yang menganut kebudayaan berbeda. Dimana dalam konteks konflik di Sambas benturan fisik yang terjadi dipermukaan dapat dipandang sebagai pemicu konflik, sedangkan penyebab konflik itu sendiri telah hadir beriringan dalam proses-proses sosial yang terjadi yang kadang jarang dianggap sebagai sumber konflik. Maka dalam pemetaannya perbedaan pola kehidupan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kebiasaan sikap dan perilaku, pelapisan dalam kehidupan sosial dan strotipe-strotipe antaretnik serta situasi kala itu dilihat sebagai sumber atau penyebab konflik yang dapat dianggap lebih berpengaruh.

Kebiasaan, sikap, perilaku, dan pola kehidupan sosial dalam satu kelompok etnis yang terakumulasi dalam suatu budaya dapat membangun strotipe-strotipe dan memunculkan isu-isu sebagai pemicu konflik. Menurut Suparlan (2006) potensi konflik ditandai dengan munculnya perasaan tertekan pada seseorang atau dikarenakan perbuatan pihak lawan, sehingga tidak mampu untuk melawan, menolak ataupun menghindarinya. Telah dikemukakan sebelumnya, secara umum masyarakat Madura yang tinggal di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas, cenderung hidup dalam masyarakat secara kolektivitas, dalam budaya kolektivitas ini individu melebur dalam hubungan-hubungan eksklusif dalam ikatan keluarga dan kelompok sesama etnis. Sehingga pola hubungan solidaritas yang terbangun menjadi sangat kuat. Etnik Madura mempunyai karakter percaya diri, berani, secara fisik kuat dan pekerja keras, sederhana, hemat, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia diupah rendah dan patuh pada pimpinan tradisional dan agama (Alqadrie, 1999; Arkanudin, 2006). Pola kehidupan kelompok yang eksklusif dan tidak sulit melebur dalam kelompok lain menimbulkan batas-batas (*boundries*) menjadi simbol dari kelompok masyarakat itu yang sangat tampak pada mereka pendatang baru. Sedikit berbeda dengan masyarakat yang telah lama menetap atau pendatang lama, mereka lebih ramah, bisa berbaur,

kurang eksklusif dan kurang memaksakan kehendak dibanding pendatang baru (Alqadrie, 1999).

Batas yang ada pada masyarakat Madura menjadi lebih terasa, karena notabennya sebagai masyarakat pendatang dimana menjadi etnis minoritas dari segi jumlah kelompok masyarakatnya, dan dalam keminoritasan sebagai kelompok kecil tersebut, mereka mampu membangun kekuatan secara sosial-politik yang turut didukung situasi rezim saat itu. Situasi tersebut mengancam kesempatan kerja dan kepemilikan yang secara perlahan dapat berpindah dari anggota kelompok etnis Melayu ke pendatang Madura, melalui kekerasan dan intimidasi sebagai faktor utama penyebab konflik antar etnis Madura dan Melayu Sambas (Alqadrie, 1999). Hal itu membuat bentangan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat setempat muncul semakin tajam sehingga terbangun citra negatif dalam skala kelompok masyarakat yang besar. Maka tesis yang dapat dimunculkan dalam hal ini ialah bahwa kondisi-kondisi yang berlangsung tersebut mengundang munculnya kekuatan (*power*) dominasi dalam jumlah etnik oleh masyarakat Melayu. Yaitu kekuatan yang disadari dengan memanfaatkan jumlah kelompok etnis yang besar dan membangun solidaritas sebagai satu-kesatuan untuk mencerminkan kekuasaan yang digunakan sebagai kekuatan dalam konflik.

### **KONFLIK KEKERASAN ETNIS MADURA-MELAYU SAMBAS**

Rasa kasih sayang dan empati seumpama selembur lapisan yang sangat tipis yang tidak sanggup menjaga harmonisasi hubungan secara tetap. Masyarakat sebagai manusia yang selalu mencoba membangun pengetahuan-pengetahuan dan kaedah-kaedah sebagai norma sosial guna mengatur relasi-relasi yang dibangun dalam struktur masyarakat yang rentan mengalami pertentangan. Kondisi-kondisi ini yang kemudian membuat terjadinya krisis relasi antara sesama kelompok masyarakat yang selalu berusaha menunjukkan identitas diri masing-masing baik individu maupun kelompok, dan subyek-subyek ini dalam kondisi relasi yang krisis berusaha saling menjatuhkan. Kekerasan sering digunakan sebagai instrument dan dianggap sebagai cara yang paling masuk akal dalam kondisi seperti itu. Adanya pertentangan dan kekerasan menjadi kajian yang menarik bagi sosok Johan Galtung, ia muncul sebagai tokoh sekaligus akademisi yang secara komprehensif mengkaji konflik dan perdamaian, pengaruh bidang ilmu Matematika yang ia tempuh saat sarjana turut mempengaruhi pondasinya sebagai tokoh positivis. Galtung juga disebut sebagai pelopor dalam menganalisis konflik dengan pandangan multidisipliner, yakni analisis konflik yang pada dasarnya mempertimbangkan kepentingan pragmatis analisis konflik (Susan, 2010).

Dalam menganalisa konflik Galtung turut menekankan pada aktor, isu dan proses konflik oleh karenanya Galtung (2009) juga mengartikan bahwa konflik merupakan ketidakcocokan antara sistem sosial aktor dengan tujuan mereka. Maka analisis konflik menjadi lebih menyeluruh yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun penyelesaian konflik atau perdamaian.

Pemikiran Galtung (1967) dalam mengkaji konflik dan perdamaian dapat diterapkan untuk memahami konflik etnis yang terjadi antara Madura dan Melayu Sambas. Pemahaman umum yang diketahui bahwa konflik yang terjadi antaretnik di Kabupaten Sambas pada tahun 1999 adalah konflik kekerasan, kejadian tersebut secara langsung dapat disaksikan pada saat itu dan kekerasan yang terjadi secara sporadis tersebut menimbulkan banyak korban dari berbagai kalangan, laki-laki dan perempuan serta anak-anak (umumnya pada etnis Madura). Galtung sendiri melihat kekerasan dengan membaginya kedalam tiga dimensi kekerasan yakni, kekerasan struktural (*structural violence*), kekerasan langsung (*direct violence*), dan kekerasan budaya (*cultural violence*).

1. Kekerasan struktural merupakan bentuk ketidakadilan yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*human need*) dikarenakan suatu sistem yang ada. Pada kondisi ini terdapat intervensi yang melibatkan lembaga-lembaga militer melalui kebijakan yang otoriter menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat. Bentuknya dapat berupa pengangguran akibat sistem, adanya diskriminasi terhadap ras dan agama oleh struktur sosial dan politik bahkan hingga hilangnya akses untuk memperoleh pendidikan, kesehatan secara adil dan bebas dan terjadi kelaparan hingga kematian (Susan, 2010).
2. Kekerasan langsung (*direct violence*). Ditandai dengan adanya tindakan saling melukai, membunuh orang lain atau penyerangan yang melibatkan bertemunya dua kelompok atau lebih.
3. Kekerasan Budaya (*cultural violence*). Kekerasan model ini dapat menjadi dasar munculnya kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti yang diungkapkan oleh Galtung (1990) bahwa kekerasan budaya melibatkan aspek-aspek kebudayaan seperti ideologi dan agama, Bahasa, seni dan lainnya sebagai legitimasi atau justifikasi kekerasan struktural dan kekerasan langsung, yang mana nilai-nilai dari budaya dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan atau konflik.

Kekerasan yang terjadi pada konflik Madura dan Melayu Sambas memungkinkan mencakup ketiga dimensi kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung. Keterkaitan ketiga kekerasan tersebut dapat dijelaskan berikut:

*Pertama*, konflik antar etnis di Sambas atau dikenal dengan sebutan kerusuhan Sambas adalah bentuk dari kekerasan struktural. Dilihat dalam skala makro dapat diamati situasi pada tahun 1999 merupakan fase terjadinya transisi era Orde Baru ke Transformasi dengan runtuhnya rezim Suharto pada tahun 1998. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru ini seakan memberi kebebasan baru bagi rakyat Indonesia yang mana mereka yang sebelumnya dikekang oleh otoritas rezim dan militerisasi serta tertekan dalam berbagai situasi kemudian bangkit atas kekuatan mereka sendiri namun namun dalam situasi seperti itu mereka masih terhimpit dalam situasi sosial-ekonomi yang buruk. Diketahui tahun 1998-2003 merupakan rentang dimana banyak terjadi kerusuhan antarsuku-bangsa, yang mana penyebabnya tidak jauh berbeda, mulai dari kesenjangan ekonomi atau dikemas dalam faktor etnis dan agama, perlakuan diskriminatif atau terjadinya rekayasa sosial (Pelly, 1999). Kondisi tersebut juga didukung dengan terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang turut menggiring berbagai gejala potensi konflik di berbagai daerah di Indonesia walaupun kondisi itu bukanlah faktor utama penyebab terjadinya konflik antar etnis di Sambas, namun tetap menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pada skala makro.

*Kedua*, kekerasan langsung dalam konflik Madura dan Melayu Sambas dapat dikatakan sebagai konsep kekerasan Galtung yang paling sesuai. Ciri-ciri kekerasan yang telah digambarkan dalam dimensi kekerasan langsung hadir dalam konflik antaretnis tersebut, yakni banyaknya korban yang meninggal akibat pembunuhan disertai perusakan harta benda dan pengusiran etnis Madura dari tempat tinggalnya (Susan, 2010). Penyerangan oleh kelompok etnis Melayu terjadi secara besar-besaran serta melibatkan kelompok kecil masyarakat etnis Dayak yang turut mengusir kelompok etnis Madura. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban yang terluka, dan tidak sedikit pula yang terbunuh serta menyebabkan terusirnya etnis Madura dari kabupaten Sambas. Korban yang terbunuh dalam peristiwa konflik tersebut kurang lebih 1.200-an jiwa, dan dampak benturan fisik tersebut menyebabkan masyarakat Madura yang terpaksa diungsikan berjumlah 59.999 jiwa atau 9.935 kepala keluarga (Setiadi, 2005). Tidak hanya penyerangan terhadap masyarakat namun, bangunan-bangunan serta hewan ternak dan sesuatu yang menggambarkan etnis Madura turut dimusnahkan. Kondisi ini dengan jelas telah menggambarkan betapa besarnya kekerasan langsung yang terjadi dalam kerusuhan di kabupaten Sambas.

*Ketiga*, Hubungan yang terjalin antar etnis Madura dan Melayu Sambas telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan adanya kekerasan budaya. Pandangan-pandangan negatif yang tergambar dalam karakter masyarakat etnis Madura terutama pada pendatang baru sangat melekat dikalangan masyarakat Melayu. Misalnya, masyarakat Madura dikenal dengan selalu membawa senjata tajam (arit), karakter tempramen, mengadakan acara-acara seperti pernikahan secara eksklusif, begitu juga dengan pendirian tempat ibadah (masjid) dan pergaulan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang turut menjadi pemicu konflik.

Relasi ketiga kekerasan ini dinyatakan oleh Galtung (1990) dengan menyebut kekerasan langsung sebagai 'kejadian atau peristiwa', kekerasan struktural sebagai 'proses' dengan hubungan atas dan bawah (hubungan vertikal) sedangkan kekerasan budaya sebagai sebuah variasi yang permanen. Oleh karenanya kekerasan budaya yang dikatakan Galtung dapat menjadi penggerak munculnya kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung yang dijelaskan sebelumnya telah cukup menggambarkan peristiwa yang mencekam dimana terjadi peristiwa yang terkesan kejam dan sadis ditandai dengan banyaknya orang-orang yang terbunuh. Setelah terusirnya etnis Madura, suasana konflik lambat-laun mereda dan kembalinya aktivitas masyarakat Melayu seperti semula. Berbeda dengan masyarakat etnis Madura, kehidupan pasca konflik dikalangan masyarakat Madura menjadi jauh lebih sulit, mereka hidup di pengungsian dan sebagian kecil tinggal rumah-rumah kerabat. Situasi pasca konflik inilah yang kemudian memunculkan kembali kekerasan struktural terhadap etnis Madura. Kondisi pengungsian tidak layak huni, pengap, kotor, berbau karena banyak sampah berserakan, ditambah lagi saluran air bersih tidak lancar semakin mempersulit kehidupan warga pengungsian, tidak jarang diantara mereka mengidap penyakit baik penyakit kulit atau diare dan bahkan berbagai penyakit yang dialami pengungsi menyebabkan kematian (Setiadi, 2005).

Hidup tanpa kepastian dialami oleh masyarakat Madura dalam pengungsian dalam rentang waktu yang sangat lama, bantuan yang didapatkan seperti keperluan bahan pokok dan uang tunjangan yang pada awal mengungsi berjalan lancar, namun kemudian tersendat dengan alasan keterbatasan dana dan karena ketidaksiapan pemerintah menghadapi situasi konflik yang berlangsung saat itu. Kekerasan terus dirasakan pengungsi pada tahap hingga tahap relokasi, yang mana tidak jarang terjadi penolakan oleh warga tempat dimana program relokasi ditujukan. Saling klaim lahan antara pemerintah dan warga sering terjadi, yang disebabkan tidak adanya koordinasi pemerintah dengan warga setempat. Situasi seperti itu menempatkan para pengungsi yakni masyarakat Madura terjebak dalam posisi 'korban'.

Kejadian dan situasi seperti itu tampak memperlihatkan kekurangseriusan aparat birokrasi dalam menangani pengungsi dan terkesan dari penanganan pengungsi yang dilakukan dengan model proyek dan kurang menekankan aspek kemanusiaan (Setiadi, 2005). Gambaran kekerasan-kekerasan yang dialami masyarakat Madura pasca konflik Sambas semakin kompleks. Peristiwa kerusuhan tersebut membangun kembali kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang dirasakan di lokasi yang berbeda

Upaya rekonsiliasi sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah, namun sejauh ini belum ada hasil dianggap menunjukkan keberhasilan upaya tersebut. Sampai saat masing-masing etnik terkesan membatasi diri untuk menjalin interaksi. Traumatik yang dialami oleh kedua belah pihak menjadi salah satu penghambat terjadinya rekonsiliasi. Pemerintah sendiri menganggap bahwa persoalan konflik telah selesai. Hubungan rekonsiliasi seakan tidak dibutuhkan lagi kedepannya karena kedua komunitas etnis sudah terkonsentrasi pada asumsi masing-masing, khususnya etnis melayu Sambas menganggap hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya dan terkesan mengabaikan kepentingan satu sama lain akan perdamaian (Bahari, 2008).

## **KESIMPULAN**

Konflik merupakan proses alamiah memang tidak bisa dilepaskan dalam suatu hubungan sosial dimana sumber-sumber penyebab konflik hampir tidak terbatas. perbedaan sikap, nilai-nilai, kebiasaan perilaku dan situasi dalam kehidupan sosial antar kelompok masyarakat merupakan hal yang sangat mudah menjadi pemicu konflik. Perbedaan ini dapat diakumulasikan sebagai sebuah budaya. Perbedaan budaya yang dimiliki etnis Madura dan Melayu Sambas sangat terbangun kontradiktif. Galtung telah menganalisis hubungan sebab-akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial dikenal dengan segitiga konflik, meliputi tiga dimensi yang saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yakni sikap, perilaku dan kontradiksi. Secara umum sikap dan perilaku kedua etnik adalah simbol yang meinterpretasikan budaya masing-masing. Penyerapan makna dari simbol-simbol sebagai komponen budaya tersebut yang menjadi buruk atau tidaknya citra yang dibangun. Oleh karena sangat perlu melihat budaya yang dimiliki kedua kelompok masyarakat yang terlibat konflik, sebagai akar untuk meninjau penyebab permasalahan, dengan melakukan pemetaan penyebab konflik. Sebagaimana telah dilihat hubungan konflik

yang menimbulkan kekerasan begitu juga membangun perdamaian dalam konflik harus meninjau akar penyebabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, I. 1999. Konflik Etnis di Ambon dan Sambas Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol.58 hlm. 36-57
- Applebaum, S; Abdallah, C; Shapiro, B.(1999), The self directed team: a conflict resolution analysis. *Team Performance Management*, Vol 5 (2) hlm. 60-77
- Arkanudin. 2006. Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat. *Jurnal Mediator*, vol 7 (2) hlm.185-193
- Atem dan Niko (2020) Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat*. Vol. 2 (2) hlm. 94-104
- Avruch, K. 1998. *Culture and conflict resolution*. Washington, D.C: United States Institute of peace press.
- Bahari, B. 2008. Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu Dan Madura Di Kalimantan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 6 (2) hlm. 1-12
- Galtung, J. 1967. *Theories of Peace a Synthetic Approach to Peace Thinking*. International Peace Research Institute: Oslo
- Galtung, J. 2009. *Theories of Conflict Difinitions, Dimensions, Negotiations, Formation, The Goal Dimension: Drives vs Consumption*
- Galtung, J. 2004. *Transcend and Transform an Introduction to Conflict*. London: Pluto Press
- Galtung, J. 1990. Cultural Violence. *Journal of Pcacc Kcscarch*, vol. 27 (3) hlm. 291-305
- Suparlan, P. 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 30 (2) hlm. 138-150
- Pelly U. 1999. Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia Suatu Kajian awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 58, hlm. 27-35

- Wallensteen, P. 2002. *Understanding Conflict Resolution War, Peace and The Global System*. London: Sage Publishing
- Setiadi. 2005. *Korban Menjadi Korban perempuan madura pascakonflik sambas*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Sulaeman, M. 2010. Dasar-Dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik Pada Masyarakat Desa Pantura Jabar. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 12 (2) hlm. 175– 190
- Susan, N. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Thakore, D. 2013. Conflict and Conflict Management. *IOSR Journal of Business and Management*, vol 8 (6) hlm. 7-16
- Ulum, R. 2013. Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas. *Jurnal Analisa*, vol, 20 (1) hlm. 25-35
- Ungerleider, J. (2008). Conflict. In: Halverson, C.B., Tirmizi, S.A. (eds) *Effective Multicultural Teams: Theory and Practice*. Advances in Group Decision and Negotiation, vol 3. Springer, Dordrecht. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6957-4\\_8](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6957-4_8)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. 2021. *Kabupaten Sambas dalam Angka, 2021*. Retrieved from <https://sambaskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/5db67f9b36ce1ec913f96ae0/kabupaten-sambas-dalam-angka-2021.html>, 15 juli 2022